

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan Dewan Pengawas KPK Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi, Dewan KPK berada sejajar dengan pimpinan KPK, dalam struktur digambarkan dengan garis lurus putus-putus yang menghubungkan pimpinan dengan Dewan yang saling berkoordinasi satu sama lainnya. Selain itu Dewan juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pimpinan KPK dan memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang diatur dalam Pasal 37B. Sedangkan hubungan Dewan Pengawas dengan Sekretariat Dewan Pengawas dihubungkan dengan garis lurus yang artinya hubungan dewan dengan sekretariat dewan terhubung secara langsung tanpa perantara.
2. Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi :
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-

Undang ini;

- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan

A. Saran

1. Perlu adanya revisi terhadap pengaturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dapat berimplikasi buruk pada KPK sebagai lembaga independen, sebab pada dasarnya KPK memiliki sistem pengawasnya sendiri yakni melalui mekanisme kontrol rakyat lewat Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Perlu adanya rekonstruksi kewenangan Dewan Pengawas agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Masalah dan Pencegahan, PT Gramedia, Jakarta
- Hartati, Evi, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Masalah dan Pencegahan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moh. Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka Lp3es Indonesia, Jakarta
- Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. 3, Yogyakarta
- Oktavia Wulandari, dkk. 2020, "Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Yudisial
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

C. Sumber Lain

Achmad Badjuri, 2011, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia)*, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/532>

Brenda Rosario Kaunang, 2023, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol. XXI/no.02

Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi Dan Nyoman S. Putra Jaya, 2020, *Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3160>

Arman Tjoneng, Christin Septina Basani, Novalita Sidabutar, 2020, *Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Penggeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice)*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 2. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/35/27>

Helmi Chandra SY, 2019, *Posisi Hak Angket DPR Terhadap KPK Sebagai Lembaga Negara*, Jurnal PPKN dan Hukum, Vol.14 No.19 <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/7798/6746>

Zulkarnain Ridlwan, 2015, “*Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dpr Terhadap Pemerintah*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/405/pdf>

Oly Viana Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, Dan Rizky Syabana Yulistya Putri, 2019, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.2. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1626>

Sekilas Tentang Kpk, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>

Tindak Pidana Korupsi Pengertian Dan Unsur-Unsurnya, <https://djp.kemenkeu.go.id/>

Di peroleh dari <https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pengawasan-internal-dan-pengaduan-masyarakat>.

Arina Manna Sikana Akbar. *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37Bb UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal of Constitutional law. Volume 2 Nomor 1 2020. Diperoleh dari <http://urj.uin-malang.ac.id>

Neni Fathiyatul Hikmah, *Keberadaan Dewan Pengawas KPK Perspektif Siyasah Duturiyah*, hlm 90. Jurnal Of Constitutional Law, hlm 90 Vol 2 Nomor 2 2020. Diperoleh dari <http://urj.uin-malang.ac.id>

Kartika S. Wahyuningrum, dkk. *“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”* Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, April 2020, hlm. 255.

Agus Suntoro, *“Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 33.

Ini Kasus Kakap yang dibongkar KPK dari hasil Penyadapan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-kakap-yang-dibongkar-kpk-dari-hasilpenyadapan.html>

Rizky Oktavianto, *Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK*, 2019, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol.5, e-ISSN: 2615-7977/2477,

<http://acch.kpk.go.id/strukturKPK>